



Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Merrisa Ulvasari^{1*}, Anggulyiah Rizqi Amaliyah²

¹⁻² Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Email: merisacantik207@email.com^{1*}

Alamat Kampus: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia 65163

*Penulis Korespondensi

Abstract. *Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in driving economic growth at both local and regional levels, including in Malang Regency. Their presence not only creates new job opportunities but also stimulates the economic activities of local communities. Nevertheless, SME actors still face a number of significant challenges. These include limited capital, incomplete business legality, low managerial capacity, and restricted access to wider markets. Such conditions often hinder SMEs from optimizing their competitiveness. This research aims to examine the implementation of SME empowerment programs carried out by the Cooperative and Micro Business Office in Kepanjen, as well as to identify supporting and inhibiting factors. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation studies. The findings reveal that SME empowerment was implemented through various programs, such as training to enhance skills, continuous business mentoring, facilitation of access to financing through financial institutions, and product promotion via exhibitions and digital platforms. These programs have provided positive impacts by strengthening the capacity and visibility of SMEs in the region. The success of these programs is supported by the strong commitment of the local government, synergy among institutions, and active participation of SME actors. On the other hand, several obstacles remain, such as low digital literacy among entrepreneurs, difficulties in obtaining financing due to legal constraints, and complex bureaucratic processes. The results of this research emphasize that SME empowerment requires adaptive strategies, continuous mentoring, and proper program mapping in accordance with local conditions.*

Keywords: *Cooperatives; Development; Empowerment; MSMEs; Sustainability*

Abstrak. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun regional, termasuk di Kabupaten Malang. Keberadaan UKM tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menjadi pendorong roda perekonomian masyarakat. Namun demikian, pelaku UKM masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan modal, perizinan dan legalitas usaha yang belum tertata dengan baik, kapasitas manajerial yang masih rendah, serta keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas. Kondisi ini membuat daya saing UKM seringkali tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana implementasi program pemberdayaan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kepanjen serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UKM dilakukan melalui berbagai program, antara lain pelatihan peningkatan keterampilan, pendampingan usaha secara berkelanjutan, fasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan, serta promosi produk dalam berbagai pameran atau platform digital. Program-program tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas dan eksistensi UKM di daerah. Keberhasilan program pemberdayaan didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang konsisten, sinergi antarlembaga yang terlibat, serta partisipasi aktif dari para pelaku UKM itu sendiri. Namun, di sisi lain masih terdapat sejumlah hambatan yang mengemuka. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UKM, sulitnya akses pembiayaan karena kendala legalitas, serta birokrasi yang cukup rumit dalam proses administrasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UKM membutuhkan strategi yang adaptif, pendampingan yang berkelanjutan, serta pemetaan program yang sesuai dengan kondisi lokal.

Kata kunci: Keberlanjutan; Koperasi; Pemberdayaan; Pengembangan; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional maupun daerah karena berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi rakyat. Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa sektor UKM menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap PDB Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UKM bukan hanya menjadi kewajiban moral, melainkan juga kebutuhan struktural pembangunan daerah.

Di Kabupaten Malang khususnya wilayah Kapanjen UKM berkembang pesat dalam bidang kuliner, kerajinan, jasa dan perdagangan. Namun, pelaku UKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, akses pasar yang sempit serta minimnya inovasi produk. Menurut (Azizah & Damayanti, 2025) persoalan klasik UKM di daerah adalah lemahnya akses terhadap teknologi dan pembiayaan sehingga membatasi ekspansi usaha dan produktivitas mereka. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi teknis pemerintah daerah memiliki mandat penting dalam melakukan pemberdayaan UKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, fasilitasi permodalan hingga pengembangan jejaring pasar (Permen Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2022).

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pemberdayaan ini masih bergantung pada sejumlah faktor, baik yang berasal dari internal maupun luar. Hasil penelitian (Anggun Hermayanti, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UKM oleh dinas terkait sangat ditentukan oleh sinergi antar stakeholder, komitmen kelembagaan serta partisipasi aktif pelaku UKM itu sendiri. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena belum banyak penelitian yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kapanjen saat pemberdayaan UKM secara praktis dan kontekstual termasuk faktor pendukung maupun penghambatnya. Padahal pemahaman komprehensif terhadap dinamika pemberdayaan di lapangan menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi pengembangan UKM yang lebih tepat sasaran (Azemia, n.d.)

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil menengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kapanjen, serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada informan terkait, sehingga dapat menggali pengalaman, persepsi dan dinamika empirik secara utuh. Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat sebab memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali realitas sosial secara kontekstual sesuai situasi nyata (Creswell & Poth, 2016).

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan kontribusi akademik dan praktis, terutama dalam rangka memperkuat strategi pemberdayaan UKM berbasis kebutuhan dan potensi lokal di wilayah Kepanjen.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pemberdayaan (empowerment) merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas, kemandirian, dan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonominya. Menurut (Sangadji & Duwila, 2020) menyatakan pemberdayaan bisa dipahami sebagai proses yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupannya sendiri. Proses ini lebih menekankan pada upaya memberi kemampuan kepada masyarakat supaya mereka bisa mandiri, sekaligus mendorong dan memotivasi agar mampu menentukan pilihan hidupnya. Pada dasarnya, pemberdayaan juga sebaiknya diarahkan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang masih tertinggal agar mereka bisa berkembang dan tidak tertinggal lagi.

Zimmerman (1995) menekankan bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi penting, yaitu kontrol personal, kesadaran kritis, dan partisipasi. Kontrol personal dimaknai sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi kondisi hidupnya. Kesadaran kritis mengacu pada pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan struktur kekuasaan yang mempengaruhi kehidupannya, sedangkan partisipasi adalah keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Dalam konteks usaha kecil menengah, pemberdayaan mencakup upaya meningkatkan keterampilan usaha, memperluas akses permodalan, penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, serta strategi pemasaran yang berkelanjutan (Harpindo Nasir et al., 2022)

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pengembangan UKM menurut (Tambunan, 2012) adalah rangkaian usaha untuk memperkuat posisi dan peran UKM dalam perekonomian melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Kegiatan pengembangan UKM meliputi pelatihan dan pendidikan kewirausahaan guna meningkatkan kompetensi pelaku usaha, pendampingan dalam manajemen usaha agar tata kelola menjadi efektif, fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan agar UKM mampu mengembangkan kapasitas produksi, penguatan kelembagaan koperasi untuk menumbuhkan solidaritas ekonomi kolektif, serta peningkatan akses pasar melalui promosi produk yang lebih luas.

Kementerian Koperasi dan UKM RI (2021) juga menegaskan bahwa strategi pengembangan UKM perlu disesuaikan dengan potensi lokal dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat daerah, sehingga program pemberdayaan bersifat kontekstual dan tepat sasaran.

Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Pemberdayaan (UKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan UKM melalui dinas teknis, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Peran dinas ini mencakup pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UKM dalam manajemen usaha dan inovasi produk. Selain itu, dinas juga melakukan pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan koperasi agar pelaku UKM memiliki struktur organisasi yang tertata dan tata kelola usaha yang baik. Fasilitasi akses permodalan menjadi salah satu peran strategis melalui penyediaan bantuan modal bergulir atau kemudahan pembiayaan di lembaga keuangan mikro dan perbankan. Di samping itu, dinas berperan dalam pengembangan pemasaran dan promosi produk melalui kegiatan pameran, digital marketing, dan jejaring distribusi yang lebih luas. Perlindungan usaha juga menjadi kewajiban dinas dalam bentuk fasilitasi legalitas, sertifikasi halal, dan standarisasi produk agar UKM memiliki daya saing yang lebih kuat (“Avriyanti, S. (2021),” n.d.)

Faktor Pendukung serta Penghambat dalam Pemberdayaan UKM

Faktor pendukung pemberdayaan UKM meliputi komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dalam memprioritaskan program pengembangan UKM di wilayahnya. (Hafiluddin & Saleh, n.d.) menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran pemberdayaan yang memadai dan berkelanjutan menjadi penentu keberhasilan program. Selain itu, partisipasi aktif pelaku UKM dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan menjadi modal sosial yang penting. Dukungan regulasi dan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha lokal juga memperkuat implementasi program pemberdayaan. Faktor pendukung lainnya adalah sinergi multipihak yang melibatkan lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta dalam proses pengembangan produk, inovasi, dan pemasaran, sehingga UKM memiliki ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pemberdayaan UKM juga menghadapi berbagai faktor penghambat. (Hamzah et al., n.d.) dijelaskan bahwa hambatan terbesar yang dihadapi UKM adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya, terutama dalam aspek manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk. Selain itu, keterbatasan modal

dan sulitnya akses pembiayaan menjadi tantangan yang signifikan bagi UKM yang belum memiliki agunan atau legalitas lengkap. Sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat berkembangnya UKM, seperti lokasi usaha yang strategis dan fasilitas produksi yang memadai. (Anggun Hermayanti, 2024) juga menambahkan bahwa rendahnya literasi digital dan teknologi informasi menghambat UKM dalam penetrasi pasar online, sedangkan birokrasi administratif yang panjang dalam pengurusan legalitas usaha, izin produksi, dan sertifikasi juga menjadi hambatan yang memperlambat pengembangan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan seperti apa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan penghambatnya. Lokasi penelitian berada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kepanjen. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling (Sugiyono, 2022) yang meliputi Kepala Seksi atau Staf Bidang Pemberdayaan UKM, staf teknis yang terlibat dalam pelatihan atau fasilitasi UKM. Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Data dianalisis melalui pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (Engle, 2015) yang menekankan pada reduksi, penyajian, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan secara interaktif agar hasil penelitian tetap valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha mikro

Pemberdayaan UKM di Kabupaten Malang, merupakan sasaran utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi teknis daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh informasi bahwa pemberdayaan dilakukan melalui empat program utama yang mencakup aspek pelatihan, kelembagaan, permodalan, dan pemasaran. Rincian program dan bentuk kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. program pemberdayaan

No.	Program Pemberdayaan	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha	Pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran digital, desain produk.	Diadakan minimal 3 kali setahun dengan tema bervariasi sesuai kebutuhan UKM.
2.	Pendampingan usaha dan kelembagaan	Konsultasi manajemen, fasilitasi legalitas usaha, pembentukan koperasi.	Mendampingi proses perizinan OSS, pembuatan NIB, sertifikasi halal.
3.	Fasilitas akses permodalan	Informasi dan rekomendasi program KUR, hibah bergulir daerah.	Masih ada UKM yang kesulitan memenuhi syarat administrative.
4.	Pengembangan pemasaran dan promosi produk	Pameran UMKM local, promosi digital di marketplace daerah	Bekerjasama dengan Disperindag, Dekranasda dan swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pelatihan kewirausahaan dilaksanakan minimal 3 kali setiap tahun, dengan fokus pada materi pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan desain produk. Pelatihan juga mampu meningkatkan keterampilan teknis pelaku UKM, serta memperkuat pola pikir kewirausahaan mereka dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks. Temuan ini mendukung pendapat (Tambunan, 2019), yang menekankan pentingnya pelatihan sebagai instrument utama dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi pelaku UKM.

Selanjutnya, program pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan dilakukan melalui konsultasi manajemen, fasilitasi perizinan (seperti NIB dan OSS), serta pendampingan dalam pembentukan koperasi. Upaya ini bertujuan untuk mendorong legalitas dan formalitas usaha sebagai pondasi pengembangan yang berkelanjutan (Kemenkop UKM, 2021). Hal ini sejalan dengan (Lestari et al., n.d.), yang menyatakan bahwa keberadaan kelembagaan usaha yang kuat menjadi kunci dalam memperluas jejaring dan akses sumber daya.

Dalam aspek fasilitasi permodalan, Dinas memberikan informasi dan rekomendasi terkait program KUR, bantuan hibah bergulir, dan kemudahan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan Lembaga keuangan mikro. Meskipun demikian, masih terdapat kendala administratif dan teknis yang dihadapi pelaku UKM, terutama terkait persyaratan legalitas dan agunan. Hambatan ini juga tercermin dalam studi (Hamzah et al., n.d.) yang menemukan bahwa keterbatasan modal dan kurangnya literasi finansial menjadi penghambat umum dalam akses pembiayaan formal.

Sementara itu, promosi dan pengembangan pasar dilakukan melalui penyelenggaraan pameran produk UMKM local, pelatihan digital marketing, dan promosi berbasis media sosial serta marketplace daerah. Kolaborasi dengan Dekranasda, Disperindag, dan sektor swasta menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan pasar. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan visibilitas produk dan memperkuat identitas merek UKM local, sesuai dengan gagasan (Hafsah, 2004) mengenai pentingnya jejaring dan promosi dalam mendorong pertumbuhan UKM secara berkelanjutan.

Faktor pendukung serta penghambat pemberdayaan UKM

Pemberdayaan UKM di wilayah Kepanjen oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang membantu maupun menghambat proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dinas, kerjasama antar lembaga, serta kesiapan pelaku UKM itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019), dimana peneliti ingin memahami secara mendalam

realitas pemberdayaan di lapangan. Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan, UKM di Kabupaten Malang punya peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung ekonomi local (BPS, 2022). Maka dari itu, pemberdayaan ukm harus dilakukan secara serius dan terarah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Faktor pendukung pemberdayaan UKM

A. Komitmen pemerintah daerah

Salah satu hal yang sangat membantu keberhasilan program adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara rutin mengadakan pelatihan, memberikan pendampingan, dan menyalurkan bantuan atau akses ke modal usaha. Komitmen ini terlihat dari alokasi anggaran dan keberlanjutan program setiap tahun. Menurut (Ida Ayu Anika Mahayani et al., 2024), program pemberdayaan UKM akan efektif kalau ada dukungan dari pemerintah daerah secara serius.

B. Kerja sama antar Lembaga

Dinas tidak berjalan sendiri, tapi bekerja sama dengan instansi lain seperti Disperindag, Dekranasda, dan bahkan sektor swasta. Misalnya, promosi produk UMKM dibantu oleh Lembaga-lembaga ini lewat pameran, promosi digital, dan pelatihan. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antar Lembaga untuk mendukung UKM, seperti yang dijelaskan oleh Kemenkop UKM (2021), bahwa ekosistem UKM yang kuat harus melibatkan banyak pihak.

C. Antusiasme dan partisipasi pelaku UKM

Banyak pelaku UKM yang antusias mengikuti pelatihan, konsultasi, dan kegiatan promosi. Partisipasi aktif ini membantu mereka mendapatkan ilmu baru, memperluas pasar, bahkan mengurus legalitas usaha mereka. Ini sesuai dengan teori Zimmerman (1995) bahwa pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif dari pelaku usaha itu sendiri, bukan hanya bantuan dari luar.

Faktor penghambat pemberdayaan UKM

A. Kurangnya pengetahuan teknologi dan manajemen

Salah satu kendala yang banyak ditemui adalah keterbatasan kemampuan pelaku UKM dalam menggunakan teknologi, seperti media sosial untuk promosi atau aplikasi keuangan untuk pencatatan usaha. Banyak juga yang belum paham cara mengelola usaha secara profesional. Menurut (Fadlurahman & Fitria, n.d.), keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi masalah utama UKM, khususnya di daerah.

B. Keterbatasan akses pembiayaan dan fasilitas produksi

Banyak pelaku UKM yang belum punya legalitas seperti NIB atau sertifikasi halal, sehingga mereka tidak bisa mengakses pinjaman seperti KUR atau program hibah dari pemerintah. Bahkan ada yang tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengurus dokumen tersebut. Tambunan (2019) menyebutkan bahwa UKM masih kesulitan dalam mendapatkan modal usaha karena syarat administrative yang rumit.

C. Biokrasi administratif dalam pengurusan legalitas usaha

Proses pengurusan izin usaha, NIB hingga sertifikasi seringkali memakan waktu dan membingungkan pelaku UKM, terutama yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah. Kompleksitas prosedur ini menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil untuk memasuki pasar formal dan mengikuti program pemberdayaan lebih lanjut. (Siahaan, A. M., Siahaan, R., & Siahaan, Y. E. (2020), n.d.) mencatat bahwa biokrasi yang rumit menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan UKM secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan studi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kepanjen., dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan telah mencerminkan upaya konkret dalam meningkatkan kapasitas, legalitas, akses permodalan, dan pemasaran UKM secara berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan empat program utama, yaitu pelatihan kewirausahaan, pendampingan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan, serta promosi dan pengembangan pasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen kelembagaan, kolaborasi antarinstansi, serta partisipasi aktif pelaku UKM. Namun demikian, program ini juga masih menghaapi hambatan yang signifikan, seperti rendahnya literasi digital pelaku UKM, terbatasnya akses terhadap modal usaha karena kendala legalitas, seta kompleksitas biokrasi dalam pengurusan izin usaha. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan supaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih fokus pada pemberdayaan berbasis digital, misalnya dengan memberikan pelatihan teknologi yang aplikatif dan mendampingi pelaku UKM secara rutin. Proses perizinan usaha juga sebaiknya disederhanakan agar pelaku UKM tidak kesulitan dalam mengurus legalitas. Selain itu, perlu ada pemetaan UKM berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing agar program pemberdayaan bisa lebih tepat sasaran. Penelitian ini terbatas pada wilayah Kepanjen dan hanya menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum bisa mewakili kondisi UKM di daerah lain. Untuk ke depannya, peneliti berharap ada penelitian lanjutan yang

menjangkau wilayah yang lebih luas dan menggunakan metode campuran (mixed methods) agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektifitas pemberdayaan UKM di tingkat regional maupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih banyak kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kepanjen, Kabupaten Malang, atas kesediaannya menjadi mitra dalam penelitian ini dan atas bantuan data serta informasi yang telah diberikan selama proses pengumpulan data. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing atas segala arahan, masukan, dan koreksi dalam penyusunan naskah ini. Artikel ini merupakan bagian dari hasil kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dijalankan penulis dalam perannya sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Penulis memiliki harapan agar bisa turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen, serta sebagai referensi kebijakan pemberdayaan UKM di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. BPS.
- Hermayanti, A., & P. R., V. (2024). Pengaruh orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing pada UMKM di Kawasan M. Said. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13825414>
- Avriyanti, S. (2021). *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1).
- Azemia, D. D. (n.d.). Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang branding dan pemasaran di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
- Azizah, N., & Damayanti, N. D. (2025). Sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis business process modelling and notation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Engle, M. (2015). Book review: *Qualitative data analysis: A methods sourcebook: The coding manual for qualitative researchers*.
- Fadlurahman, F. G., & Fitria, I. J. (n.d.). Analisis keterbatasan sumber daya manusia terhadap kinerja pada Rumah BUMN Bandung.
- Hafiluddin, M. R., & Saleh, C. (n.d.). Strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis “community based economic development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo).

- Hafsah, M. J. (2004). Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). *Infokop*, (25), 40–44.
- Hamzah, M., Ningsih, R. F. Y., & Fitriya, L. (n.d.). Peran transformasi digital dan tantangan inovasi terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia (Studi literature review).
- Nasir, H., Nurhayati, N., & Sriyanti, E. (2022). Analisis upaya Dinas Koperasi Usaha, Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 102–119. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i1.797>
- Mahayani, I. A. A., Yudhartha, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 95–107. <https://doi.org/10.61292/birev.96>
- Lestari, L. A., Spetira, A. D., & Herawati, A. R. (n.d.). Pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.
- Sangadji, M., & Duwila, U. (2020). Model pemberdayaan masyarakat Desa Tehoru Kabupaten Maluku Tengah (Tinjauan program P3SD). *Jurnal Cita Ekonomika*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v14i1.2619>
- Siahaan, A. M., Siahaan, R., & Siahaan, Y. E. (2020). [Tanpa judul].
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.